



# Disdikpora Rancang Perbup Biaya Pendidikan Ditarget Rampung April

Tabanan (Bali Post) -

Mencegah perdebatan yang kerap muncul di kalangan orang tua siswa khususnya musim penerimaan siswa baru disikapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tabanan dengan merancang peraturan bupati (perbup) rentangan biaya pendidikan.

Kepala Disdikpora Tabanan Putu Santika mengatakan perbup tersebut ditargetkan rampung April mendatang. "Tahapannya tinggal me-review akhir, untuk perbup ini kami juga sudah koordinasi dengan para guru dan dewan pendidikan," ujarnya, Kamis (19/3) kemarin.

Dijelaskannya, pihaknya juga telah mengumpulkan para kepala sekolah untuk memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan isi perbup. Disinggung terkait adanya penolakan dari sejumlah guru dalam menentukan standardisasi biaya pendidikan, Putu Santika

mengatakan, hal itu wajar mengingat jika mengacu ke Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memang biaya pendidikan tidak boleh distandarkan. "Yang diperbolehkan hanyalah membuat rentangannya," imbuhnya.

Untuk nilai rentangannya, akan diambil titik tengah

dengan melihat dasar perencanaan yang dibuat oleh sekolah. Artinya tidak bisa disamakan.

Sementara di tempat terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Tabanan, Wayan Madra Suartana, mengatakan, perbup yang mengatur rentangan biaya pendidikan ini sangat diperlukan sebagai payung hukum biaya pendidikan. Hal ini agar tidak ada lagi gejolak yang muncul antara pihak sekolah dan orang tua murid khususnya dalam mengawali tahun ajaran baru.

Di satu sisi, sekolah juga harus pintar-pintar menjalankan roda pendidikannya di tengah keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah pusat. "Terkadang jadi sebuah pertanyaan besar tentang ada tidaknya bantuan masyarakat untuk pendidikan. Di sini tentu terjadi dilematis, satu pihak sekolah dilarang memungut biaya kepada siswa, sementara pihak sekolah tidak bisa membiayai dirinya dengan bantuan pemerintah saja," jelasnya. (kmb28)

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 13



Capaian Kinerja dalam Pembangunan Infrastruktur

# Jalan di Badung 100 Persen Dalam Kondisi Mantap



INFRASTRUKTUR - Bupati Badung A.A. Gde Agung ketika meninjau pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung.

PROGRAM infrastruktur berupa peningkatan jalan di Kabupaten Badung telah tercapai. Bahkan, telah melebihi target yang dicanangkan pada akhir RPJMD Tahun 2015 sebesar 99,75 persen. Hal itu diungkapkan Bupati Badung melalui Kabag Humas Pemkab Badung A.A. Raka Yuda, Kamis (19/3) kemarin.

Dikatakannya, tahun 2014 kondisi kemandapan jalan di Badung (jalan yang kondisi sedang dan baik) telah mencapai 100 persen. "Artinya, di Badung tidak terdapat jalan yang rusak yang menghambat pelayanan kepada pemakai jalan," ujarnya.

Begitu juga di bidang pengairan. Raka Yuda mengatakan, melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya yang terfokus pada perbaikan jaringan/saluran irigasi, telah pula menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sampai tahun 2014, saluran irigasi yang kondisinya baik mencapai 94,45 persen dari target yang ditetapkan sampai tahun 2015 sebesar 92,09 persen.

Untuk program peningkatan sarana-prasarana aparatur,

sampai tahun 2014 mencakup kegiatan fisik antara lain pembangunan kantor lurah, kantor camat, penataan interior, pembangunan gedung di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, pembangunan Gedung RSUD, lapangan, penataan pura dan renovasi wantilan. Program penyehatan lingkungan dengan kegiatan penyediaan sarana air bersih, sampai tahun 2014 telah mencapai 23 unit dan akan dikerjakan 4 unit pada tahun 2015. Sedangkan kegiatan sambungan rumah air limbah, tahun 2014 telah mencapai 3 paket dan 1 paket dilaksanakan pada tahun 2015. Untuk *masterplan*, dilaksanakan tahun 2015 sebanyak 1 paket.

Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung tidak diikutkan penilaian pada tahun 2013 untuk memberi kesempatan daerah lain. "Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Badung diikutkan kembali dalam penilaian dan kembali berhasil memperoleh penghargaan peringkat I Bidang Pengelolaan Jalan Terbaik Kabupaten di Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum," kata Raka Yuda.

Capaian kinerja pada bidang urusan perumahan, melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan, sampai tahun 2014 telah mencapai 255 paket peningkatan jalan lingkungan, 52 kegiatan konsultasi dan 11 kegiatan operasional. Sedangkan dalam bidang urusan penataan ruang, juga terdapat capaian kinerja yang terukur. Ini mengacu pada pedoman penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung berdasarkan rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Ini ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Ka-

bupaten.

Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diharapkan kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten paling lambat tiga tahun sejak peraturan ini ditetapkan. Setelah melalui pembahasan dan

Dari pengelolaan jalan, Pemkab Badung melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung telah memperoleh trofi penghargaan peringkat pertama bidang pengelolaan jalan terbaik kabupaten di Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum. Penghargaan ini berturut-turut dari tahun 2009, 2010, 2011 dan trofi khusus pada tahun 2012 atas kinerja terbaik tiga kali secara berturut-turut. Atas ketentuan lomba Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PKPD) dari

evaluasi, akhirnya tahun 2013 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Penyusunan Ranperda RDTR dan diharapkan tuntas menjadi Perda pada tahun 2015. (ad4)

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 2



Dituntut 1,5 Tahun

# Oknum DPRD Gianyar Minta Dibebaskan

Denpasar (Bali Post) -

Setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah bansos dan dituntut hukuman satu tahun enam bulan (1,5 tahun) penjara, oknum DPRD Gianyar, terdakwa Ngakan Putu Tirta Pramono, Rabu (18/3) lalu, diberikan kesempatan melakukan pembelaan (pledoi). Terdakwa melalui kuasa hukumnya, Ngakan KOMPIANG DIRGA dan Ngakan Putu Putra Arnaya, di depan majelis hakim pimpinan Ahmad Paten Sili, menyatakan bahwa pihaknya tidak sependapat dengan penuntut umum.

Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada pada terdakwa karena jabatannya atau kedudukannya. KOMPIANG DIRGA mengatakan, apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan. "Karena sesuai fakta persidangan, terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan pengajuan proposal yang dilakukan Dadia Pulasari dan Dadia Cameng," ujar pengacara yang

berkantor di Bangli itu.

Pun soal kerugian negara. Kuasa hukum terdakwa di depan persidangan mengatakan, Ngakan Putu Tirta Pramono, tidak pernah merugikan keuangan negara. Dijelaskan, dana hibah yang diajukan dadia itu ke petugas bagian pembangunan Pemkab Gianyar. "Itu berdasarkan fakta bahwa sudah diterima masing-masing Rp 50 juta," katanya.

Atas berbagai argumen yang diajukan di

persidangan, Pramono melalui kuasa hukumnya, menyatakan tidak terbukti secara hukum melakukan korupsi, sebagaimana dakwaan jaksa. "Oleh karena itu, jika majelis hakim sependapat dengan kami, menurut hukum sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa. Jika majelis hakim punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," tandas KOMPIANG DIRGA.

Sebelumnya, terdakwa

yang oknum anggota DPRD Gianyar dari PDI-P itu dituntut hukuman satu tahun enam bulan (1,5 tahun) penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) Herdian Rahardi, I Nengah Astawa, dan I Ketut Gede Dama Negara, di hadapan majelis hakim pimpinan Ahmad Paten Sili, menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan subsider. "Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair," tuntutan jaksa.

Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana dalam dakwaan subsidair. (kmb37)

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 9



## Pipa Distribusi Jauh

# Puluhan Calon Pelanggan PDAM Belum Terlayani

Tabanan (Bali Post) -

Meski masih memiliki sekitar 4.000 sambungan, namun masih ada calon pelanggan PDAM yang tidak terlayani. Berdasarkan data 2014, masih ada 30 calon pelanggan yang masih menunggu sambungan PDAM. Belum terlayannya puluhan calon pelanggannya ini menurut Kepala Bagian Hubungan Pelanggan PDAM Tabanan, I.B. Marjaya Wirata, Kamis (19/3) kemarin, karena lokasi pemasangan jauh dari pipa distribusi sehingga membutuhkan waktu dan dana.

Biasanya untuk dana pemasangan dibebankan kepada konsumen. Untuk pemasangan satu titik saja bagi lokasi yang dekat dengan pipa distribusi adalah Rp 2,2 juta. Agar tidak membebankan konsumen, pihak PDAM menyarankan sebelum melakukan pemasangan pipa, konsumen diminta untuk mengumpulkan dana secara kolektif. "Kalau mendanai sendiri tentu berat, oleh karenanya disarankan secara kolektif. Biasanya ini yang membuat lama karena mengumpulkan orang dulu," ujar Wirata.

Menurutnya, untuk daerah Kota seperti Tabanan

dan Kediri hampir tidak bermasalah dengan pemasangan baru terutama yang dekat dengan pipa distribusi. Jika ada antrean biasanya terjadi pada perumahan yang belum ada sambungan PDAM dan lokasinya jauh dari pipa distribusi. Apabila memerlukan waktu yang lama dalam pemasangannya, lanjut Wirata, biasanya konsumen membuat sumur. "Jika menurut mereka lebih murah dana untuk membuat sumur daripada membuat sambungan baru, biasanya konsumen beralih ke sumur," paparnya.

Mengenai kesiapan menjelang Nyepi, Wirata memaparkan jika pihak PDAM telah melakukan pemeriksaan pompa air selama seminggu ini. "Selama pengecekan ini tidak ada permasalahan berarti. Diharapkan ketersediaan air selama Nyepi tidak mengalami masalah," paparnya. Selain itu, pihak PDAM juga melakukan koordinasi pada PLN apabila ada rencana pemadaman terutama di daerah-daerah PDAM yang pompanya tergantung listrik sehingga bisa diantisipasi. PDAM juga menyiagakan petugas jaga selama 24 jam di masing-masing pos. (kmb24)

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 13



## Pastikan Pengelolaan Anggaran Transparan

### Saatnya Pemkab Tabanan

### Gunakan "E-Budgeting"

**PENGELOLAAN** anggaran yang masih menggunakan sistem manual kian membuka kesempatan para oknum koruptor melakukan penyelewengan dan pencurian anggaran. Apalagi, tidak ada pengawasan dan kontrol ketat terhadap penggunaan anggaran tersebut, ini bisa menjadi pemicu munculnya anggaran-anggaran siluman yang justru pemanfaatannya tak sesuai dengan program kerja pemerintah.

Penyelenggara negara bisa berkaca dari kasus dugaan munculnya anggaran siluman yang membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berseteru dengan DPRD DKI Jakarta. Ada yang menarik dari konflik ini, yakni mulai kelihatan betapa urgennya pemerintah menerapkan *e-budgeting* untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran dari oknum tak bertanggung jawab yang bisa datang, baik dari eksekutif maupun legislatif.

Pengelolaan anggaran dengan sistem *e-budgeting* menjadi perhatian serius calon Bupati Tabanan dari jalur independen A.A. Ngurah Panji Astika, S.T. Tokoh dari Puri Anom Tabanan ini menilai, pengelolaan anggaran dengan sistem *e-budgeting* sudah saatnya diterapkan pemerintah daerah di Bali, termasuk Kabupaten Tabanan. Menurut Panji Astika, sistem kelola anggaran secara *online* ini

mampu menghindari adanya upaya penyelewengan dan pencurian anggaran. Selain itu, para pemimpin daerah juga mampu mengawasi dan mengontrol pengeluaran anggaran di dinas-dinas terkait.

"Sudah saatnya pemerintah di Bali menggunakan sistem *e-budgeting*. Jika tidak, sangat rawan terjadi penyelewengan anggaran oleh oknum tertentu. Selain itu, sistem ini juga bisa mengefektifkan pengeluaran daerah terhadap program-program kerjanya. Jika ada anggaran yang tak sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka akan ketahuan dan ditolak sistem," beber Panji Astika.

Pengusaha muda ini memberi contoh betapa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terus merangkak naik di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini. Kenaikan itu bukan tanpa sebab. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Risma tak lagi menggunakan secarik kertas dalam menentukan kebijakan atau menjalankan proyek pembangunan. Semua bisa berjalan dengan baik dan transparan dengan sistem *e-budgeting*.

"Ibu Risma sudah sukses menerapkan sistem ini. Pengeluaran di tiap satuan kerja perangkat daerah juga bisa dikontrol. Kita bisa terapkan ini di seluruh sektor seperti kesehatan, pendidikan, per-



**A.A. Ngurah Panji Astika, S.T.**

baikan jalan, pajak, sampai dengan kenaikan pangkat," jelas suami Anak Agung Sagung Mas Dewi Rahmayani ini.

Panji Astika meyakini jika sistem *e-budgeting* ini dikombinasikan dengan penerapan *e-procurement* (Layanan pengadaan secara elektronik/LPSE) dan *e-sourcing* (sistem pendukung pengadaan barang), akan menjadi cara yang ampuh untuk menangkal pelbagai macam modus korupsi. Misalnya, manipulasi spesifikasi barang, penggelembungan harga, manipulasi proses tender, dan realisasi penggunaan anggaran yang tidak wajar. Hal ini sesuai dengan misi Panji Astika yakni *zero tolerance to corruption*.

"Semua pengelolaan anggaran bisa diakses via *online*. Jadi masyarakat juga mengetahui anggaran pemerintah itu digunakan untuk apa. Masyarakat punya hak untuk itu, karena anggaran ini cermin dari pembangunan di



Sambungan.

daerah. Dengan sistem ini, niscaya pengelolaan pemerintahan yang jujur, profesional dan kerja keras akan terwujud. Ini akan saya mulai di Tabanan," sebutnya.

Tak selesai di sistem *e-budgeting*. Panji Astika juga ingin ketika dirinya diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin Tabanan, pemerintah di Tabanan juga menerapkan *e-controlling*. Sistem ini bertujuan untuk melakukan kontrol langsung terhadap hasil kerja satuan pemerintah daerah, termasuk penggunaan anggarannya. Jika sedikit saja ada penyelewengan, maka akan cepat ketahuan. Dengan sistem ini pula, lanjut Panji Astika, ketika ada proyek, masyarakat bisa melayangkan protes langsung. Jadi sistem itu dibuat benar-behar transparan dan melibatkan masyarakat sebagai pengawas. "Sekali lagi sudah saatnya pemerintah di Bali menerapkan sistem *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-controlling* dan *e-sourcing* dalam satu kesatuan sistem *e-government* yang utuh. Di negara maju, penerapan pelbagai sistem layanan elektronik itu bukan hanya terbukti sukses meminimalkan potensi terjadinya korupsi, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan pelayanan publik. Ketika saya diberi kepercayaan memimpin Tabanan, sistem ini akan saya terapkan pertama kali di Pemkab Tabanan. Sehingga tak ada oknum yang bisa melakukan korupsi anggaran APBD. Anggaran yang dikelola secara transparan ini dapat digunakan untuk pembenahan infrastruktur, salah satunya jalan," tutupnya. (ad1)

hal-2

Edisi : Jumat, 20 Maret 2015

Hal : 5